

MAKNA “NASIONALISME NEGARA- BANGSA” MELALUI TEKS MEDIA

THE MEANING OF “NATIONALISM OF NATION-STATE” IN MEDIA TEXT

S. Arifianto

Puslitbang IKP dan Aptika Kemkominfo. E-mail: arief2008@gmail.com
Naskah diterima November 2012; direvisi Mei 2013; disetujui terbit 27 Juni 2013

ABSTRACT

Nationalism has a strategic role in maintaining identity of nation-state. Although it is disputable. This article describes and analyses it from some perspectives. The results are: (a) From economic perspective, it emerges a pragmatic need to achieve dominant economic growth. It's expected to contribute to public welfare, economic stability for nationalism, nation-state; (b). From economic, social politic perspective, globalization and local community strengthening which is characterized by regional autonomy. If there is mismanagement, it will be an obstruction for nationalism; (c). From cultural perspective, there is an indication that culture tends to unravel nationalism, nation-state. Therefore, “glocalisation” of culture in local community should not be viewed as counterinternationalism againsts nation-state, on the contrary, it strengthens nationalism, in the context of nation-state. Media contents is able to frame and articulate representation & nationalism concept. Nation-state is not only in the cognitif level, but also in the level nationalism ideology, nation-state. Hence, nationalism spirit of nation-state must be bolstered, although only by construction on media text.

Keywords: *Media Text; Strengthenment of Nation-state nationalism ideology.*

ABSTRAK

Nasionalisme memiliki peran strategis untuk mempertahankan identitas Negara-bangsa, meski masih menjadi persoalan diskursif. Tulisan artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari berbagai perspektif. Hasilnya adalah: (a). Dari perspektif ekonomi, muncul kebutuhan pragmatis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dominan, diartikulasikan dapat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan stabilitas ekonomi, demi nasionalisme, negara-bangsa; (b). Dari perspektif sosial politik, proses globalisasi dan penguatan komunitas lokal yang bercirikan otonomi daerah jika salah implementasinya bisa menjadi ancaman nasionalisme; (c). Dari perspektif budaya muncul gejala bahwa kebudayaan cenderung melepaskan keterikatannya pada nasionalisme, negara-bangsa. Proses “glokalisasi” budaya di komunitas masyarakat lokal hendaknya tidak dilihat sebagai kontra “nasionalisme negara-bangsa”, tetapi justru menjadi penguatan nasionalisme dalam kontek negara-bangsa. Pada akhirnya, teks media mampu membingkai dan mengartikulasikan representasi dan konsep nasionalisme, negara-bangsa bukan sekedar pada tataran kognitif, tetapi juga pada ideologi nasionalisme, negara-bangsa. Pada titik itulah semangat nasionalisme negara-bangsa dapat dibangkitkan, meski hanya melalui konstruksi teks media.

Kata-kata Kunci: teks media, penguatan ideologi nasionalisme negara-bangsa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di sekitar pertengahan tahun, 2000-an warga Kabupaten Sangau dan Bengkayang, perbatasan Kalimantan Barat-Serawak beramai-ramai mengganti identitas kewarganegaraannya menjadi warga Negara Malaysia. Perpindahan kewarganegaraan masyarakat di perbatasan tersebut bermotif untuk mencari penghidupan yang lebih layak, karena mereka sudah tidak tahan dengan tekanan kemiskinan. Dalam konteks ini kemiskinan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong lunturnya

nasionalisme Negara-bangsa” di daerah perbatasan [1]. Peristiwa selanjutnya kemarahan masyarakat Indonesia terhadap Malaysia atas kalahnya sengketa Pulau Sipadan dan Linggitan di sidang Mahkamah Internasional (*International Court*), Den Hag tahun 2003, serta klaim produk budaya batik, jenis tarian reyog Ponorogo, lagu Rasa Sayange dan kesenian angklung, memperlihatkan bahwa

masyarakat kita masih menginginkan terjaganya “*Nasionalisme Negara-Bangsa*” (Suwarsono 2011, 90). Kejadian berikutnya dipenghujung tahun 2011, siswa SMK Surakarta yang berhasil memproduksi otomotif merk “Esemka” langsung direspon Walikota Pemerintah Surakarta, dengan mengganti mobil dinas dengan mobil baru merk Esemka. Peristiwa tersebut akhirnya berkembang menjadi opini publik di media massa dan media *online*. Mereka umumnya menyatakan kerinduannya terhadap “Nasionalisme” melalui produk nasional otomotif buatan siswa SMK di Surakarta itu [2].

Merujuk ketiga peristiwa tersebut, pemaknaan “nasionalisme” negara-bangsa (kebangsaan) dalam teks media cenderung bervariasi. Ragam interpretasi dalam pemaknaan “nasionalisme” negara-bangsa dalam konteks ke-Indonesia-an, diwarnai latar belakang masing-masing individu bahkan terjadi pemahaman yang “salah kaprah” dan terkesan sangat dangkal. Secara etimologis nasionalisme itu sendiri berangkat dari kata “*nation*” dan “*isme*” yang diartikan sebagai paham kebangsaan. Pengertian meletakkan nasionalisme sebagai satu kesatuan dengan negara dalam teks budaya tentu tidak bersifat abadi, karena negara merupakan bentuk dialektika dari peradaban manusia yang awalnya terdiri dari banyak bangsa (Smith 1990, 204).

Paham negara-bangsa itu menurut Smith dicetuskan para *founding father* yang didefinisikan sebagai “*sekumpulan jiwa yang berada pada teritorial tertentu yang memiliki persamaan nasib dan sepenanggungan*”. Maka “bangsa” dimaknai sebagai sebuah ikatan yang melebihi teritorial, yakni sebuah kumpulan geopolitik dengan kesamaan pandang untuk membentuk sebuah negara. Begitu banyak ragam penafsiran dalam pemberian makna “nasionalisme” (Negara-bangsa), dalam konteks ke-Indonesia-an pada teks budaya media di Indonesia. Pada akhirnya dari latar belakang di atas memunculkan pertanyaan bagaimana konstruksi makna teks “nasionalisme” negara-bangsa dalam konteks ke-Indonesia-an. Artikel ini lebih memfokuskan pada analisis diskursif tentang pemahaman makna “nasionalisme” negara-bangsa atau kebangsaan dilihat dari berbagai perspektif yang sedang berkembang dalam teks budaya media di masyarakat saat ini.

Kerangka Konsep

Konsep “Nasionalisme” negara-bangsa

Ketika kita bicara tentang “nasionalisme negara-bangsa”, tentu kita tidak bisa lepas dari konteks Indonesia sebagai masyarakat yang plural dan budaya multikultural. Konsep pemaknaan nasionalisme negara-bangsa bukan hanya didominasi konsep politik dan ekonomi fraksis, tetapi juga konsep-konsep tentang budaya. Nasionalisme dapat dimaknai sebagai gambaran ikatan budaya yang menyatukan rakyat Indonesia yang majemuk menjadi satu bangsa dalam satu ikatan (*nation state*) negara-bangsa (Anderson 1991, 14). Negara-bangsa dalam konteks ini memiliki peran strategis untuk mempertahankan makna nasionalisme sebagai identitas kebangsaan, yakni tersymbolisasinya makna ke-Indonesia-an. Makna terpenting dari pandangan Benedict Anderson dalam *Imagined Community* adalah sejarah panjang negara-bangsa membangun dirinya, terutama berkat unifikasi bahasa (lewat aksara Latin) dan kapitalisme cetak telah mencapai bentuknya hingga sekarang.

Dalam konteks pandangan modern, bangsa adalah komunitas politis yang dibayangkan, bersifat terbatas, dan berdaulat. Anderson telah menyadarkan kita bahwa tendensi esensialis telah batal di hadapan negara-bangsa. Sebuah bangsa ternyata tidak persis ketika kita membayangkannya tidak ada yang “sejati” dan esensial pada bangsa. Ia semata-mata hanya dibayangkan dan diciptakan. Sebuah bangsa ternyata tak lain adalah sebuah penanda (*signifier*), dengan sejumlah petanda (*signified*) yang selalu bergeser atau bahkan “meleset” setiap kali kita mencoba menangkapnya. Untuk memberikan penafsiran lebih jauh terhadap gagasan Anderson dalam konteks tulisan ini, identitas nasional adalah tanda, teks, atau wacana (bahasa, tradisi, pakaian, simbol, dan sejenisnya), yang memberikan bayangan tertentu tentang kesamaan dan kebersamaan sebuah komunitas.

Berdasarkan konsep tersebut secara bersama-sama mereka membayangkan diri sebagai sebuah bangsa dengan mengabaikan (untuk sementara) perbedaan-perbedaan di antara mereka sendiri. Identitas kebangsaan memiliki garis batas tertentu, tidak ada identitas yang bisa merepresentasikan sebuah bangsa secara utuh dan penuh, bahkan identitas kebangsaan seringkali bersifat ambivalensi dan mengalami kelunturan. Lunturnya nasionalisme negara-bangsa, sama halnya dengan menurunnya ideologi identitas negara-bangsa (Schulte 2008, 37). Salah satu diantara faktor penyebab lunturnya identitas nasionalisme negara-bangsa (nilai kebangsaan) salah satu diantaranya disebabkan tidak

tepatnya implementasi kebijakan sistem pemerintahan desentralisasi ke dalam bentuk pemerintahan otonomi (Azzam & Thung, 2011 dalam Suwarsono (2011, 5). Di samping itu, lunturnya identitas nasionalisme juga tidak bisa lepas dari konsep nasionalisme itu sendiri. Dimana Thung

(2011) dalam Suwarsono (2011, 14) melihat bahwa “nasionalisme” itu sendiri merupakan konstruksi teoritis yang berorientasi pada dominasi peran negara sebagai struktur dan aktor dalam kehidupan publik. Negara dalam konteks ini diyakini sebagai tiang (*soko-guru*) dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada hal dalam negara itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakatnya yang disebut “rakyat”. Menurut Anderson (1991, 21) negara-bangsa (*nasionalism*) dalam konteks ini dilihat dari perspektif komunitas bukan dari perspektif negara atau politik.

Memang secara historis, nasionalisme berangkat dari konstruksi elit politik yang membentuk negara-bangsa, bukan terdiri dari sekumpulan komunitas lokal (Berrett 1991, 87). Namun demikian, nasionalisme negara-bangsa itu sendiri sebagai identitas nasional secara intrisik terkait dengan konstruksi berbagai bentuk komunikasi multikultural sebagai bentuk kebhinekaan. Misalnya konsep “bangsa” didefinisikan sebagai komunitas terbayang (*imagined community*), dan “identitas nasional” didefinisikan sebagai konstruksi yang dipadukan melalui simbol dan ritual budaya dalam kaitannya dengan kategorisasi teritorial dan administratif (Barker 2005, 205). Konstruksi teritorial dan administratif dapat dilihat dari implementasi UU No: 32/2004/ tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebagian kewenangan (kekuasaan) yang dimiliki pemerintah pusat telah ditransformasikan kepada pemerintah daerah. Maka selama nasionalisme dalam perspektif daerah tidak diberikan ruang kebebasan, dan ditempatkan pada posisi yang wajar sebagai unsur penting dalam konstruksi “nasionalisme” negara-bangsa, maka selama itu pula “etnonasionalisme” akan tumbuh menjadi batu kerikil yang memperlemah makna nasionalisme sebagai identitas kebangsaan, demikian Thomas Friedman, (1999, 47) melihatnya. Artinya identitas nasionalisme kebangsaan akan tetap bertahan jika seluruh warga dan penyelenggara negara bisa mengelola perbedaan serta keanekaragaman kultural menjadi konstruksi aset budaya bangsa yang kokoh dan tetap konsisten untuk dipertahankan sampai kapanpun. Perlu kita pahami bersama bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini dibangun sejak awal berdirinya berdasarkan kebhinekaan. Maka dalam konsep “Negara–Bangsa” pluralitas budaya masyarakat menjadi aset pendiriannya. Meski demikian tentu tidak tertutup kemungkinan ada berbagai pandangan atau penafsiran yang bervariasi tentang eksistensi, nasionalisme “Negara-Bangsa” dalam konteks ke-Indonesia-an. Perbedaan itu juga bisa kita dapatkan dalam banyak teks media, yang terkait dengan pemaknaan Negara-bangsa yang kita diskusikan ini.

PEMBAHASAN

Nasionalisme dalam Perspektif Negara-Bangsa

Sebagai proses dialektika, nasionalisme kebangsaan berkembang secara dinamis, dimana ia berangkat dari nasionalisme kultural yang kemudian ditransformasikan ke nasionalisme politik dalam bentuk negara-bangsa melalui Pancasila dan UUD 1945. Pada rezim pemerintahan “Orde Baru”, konstruksi nasionalisme kebangsaan dijaga sangat ketat dan cenderung bersifat subversif. Warga yang berbeda pandangan politik dan budaya dengan pemerintah atau negara-bangsa ketika itu dianggap menentang Pancasila dan UUD 1945. Mereka dikucilkan dan tidak diberikan akses layanan publik disektor pemerintahan. Bahkan mereka dicap(diberikan lebel) sebagai pengikut partai terlarang ketika itu. Namun sejak reformasi 1998 sampai sekarang, kondisinya sudah bergeser jauh lebih bebas dan demokratis. Nasionalisme di Indonesia hingga saat ini masih ada, tetapi belakangan substansinya dalam praktik penegakan demokrasi dan hukum kurang kondusif dan cenderung mulai kehilangan arah (Thung Ju Lan dalam Suwarsono 2011, 15). Nasionalisme Negara–bangsa itu menjadi melemah akibat komitmen penyelenggara negara, dominasi pasar global, desentralisasi otonomi komunitas lokal dan implementasi otonomi daerah yang tidak konsisten (Francisia Seda dalam Suwarsono 2011, 37). Proses demokrasi dan modernisasi yang didorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) cenderung berpengaruh terhadap penguatan pasar global. Proses yang digerakkan oleh pasar global itu sebenarnya dapat memperkuat otonomi otoritas local sehingga dapat mengimbangi kekuatan, “nasionalisme” negara-bangsa (Giddens 1999, 127). Dewasa ini baik langsung atau tidak langsung kita dihadapkan dengan implementasi UU No:32/2004/ tentang pemerintahan daerah yang tidak kondusif. Konsep awal terselenggaranya peraturan tersebut adalah untuk menumbuhkan pemerataan demokratisasi dan meredam tingginya suhu politik local. Tetapi yang muncul diberbagai daerah justru

sampai pada tuntutan pemisahan diri dari ikatan NKRI. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa, mesin “nasionalisme Negara-bangsa”, yang digunakan sebagai acuan untuk menyatukan Negara tidak berjalan mulus. Ego sektoral, dan identitas local yang menjadi simbolisme daerah lebih menonjol, dan

berpotensi dibanding dengan konsep Negara-bangsa yang digunakan dasar untuk mengkonstruksi nasionalisme kebangsaan.

Kondisi itu muncul, karena kuatnya tekanan dinamika budaya politik lokal yang tidak mampu terakomodasi elite kekuasaan di tingkat pusat. Apa yang saya maksudkan disini adalah runtuhnya tatanan budaya dan terganggunya komunikasi politik pasca reformasi 1998. Otonomi daerah, yang dikonsentrasikan untuk penguatan budaya politik dan ekonomi lokal masih belum dipahami secara utuh oleh para pemangku kebijakan di berbagai daerah. Dalam konteks ini, dominasi dan kekuasaan para elite politik lokal lebih menonjol dari pada konsep “Negara-bangsa” yang dikonstruksi dari budaya multikultural pada setiap pengambilan keputusan politik di daerah. Misalnya implementasi pemekaran daerah, masih dipahami untuk pembagian kekuasaan di tingkat elit politik lokal, bukan dalam rangka menyejahterakan masyarakat di daerah yang dimekarkan. Seharusnya otonomi daerah menjadi pintu masuk untuk mencari identitas pengembangan budaya politik lokal.

Konsep multikultur di daerah otonomi tentu bukan dominasi putra daerah, etnik tertentu, kelompok komunitas pembisnis, seperti yang selama ini dijadikan justifikasi pembentukan daerah otonomi khusus tertentu. Pada hal seharusnya nasionalisme “Negara-bangsa” ini bisa dibangun di tingkat lokal jika persyaratan utamanya terpenuhi seperti cendekiawannya, pendukungnya, diskursusnya, dan mediana. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Aceh masa silam, yang mengakibatkan terjadinya konflik horizontal, dan vertikal dengan banyak korban manusia, hal serupa juga terjadi di Papua (Suwarsono 2011, 99). Fukuyama (1992, 26) sendiri melihat bahwa nasionalisme tidak lagi menjadi kekuatan yang signifikan dalam sejarah ketatanegaraan. Menurutnya nasionalisme “lama” semakin surut diberbagai negara demokrasi paling liberal seperti Eropa dan Amerika. Jika masih ada nasionalisme yang bersifat kultural, itu bukan politik, sehingga implementasinya lebih toleran. Meski Fukuyama tidak membantah bahwa dewasa ini tumbuh nasionalisme baru di berbagai wilayah yang pertumbuhan sosial dan ekonominya relatif rendah. Secara historis, nasionalisme baru itu banyak terdapat di negara berkembang, yang pada tahap awal melaksanakan modernisasi dan industrialisasi seperti beberapa negara bekas wilayah Uni Soviet dan Eropa Timur (Fukuyama, 1992, 27).

Nasionalisme dalam Perspektif Ekonomi & Industri

Isu populis di abad 20-an di Indonesia adalah pembangunan sektor industri dan modernisasi, tetapi permasalahannya sejauhmana dampak modernisasi dan industrialisasi itu berpengaruh terhadap isu nasionalisme-kebangsaan. Beberapa kajian menganalisis bahwa modernisasi dan industrialisasi menjadi salah satu faktor penting terhadap surutnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Tetapi jika kita bertolak dari tesis Fukuyama (1992, 67) menyatakan bahwa modernisasi dan industrialisasi secara *de facto* sebelum tahun 1970-an di Indonesia mampu menggantikan isu nasionalisme secara dominan. Ketika itu berdasarkan pengamatan penulis kebutuhan dan pertimbangan pragmatis untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan negara berkembang lainnya cenderung mendominasi. Bahkan bergeser menjadi isu nasionalisme yang berkekuatan internasional. Jika meminjam “teori ketergantungan” (*dependency theory*), Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sejak itu telah terseret ke dalam orbit ideologi kapitalisme.

Gejalanya semakin menguat dan tampak ketika globalisasi pasar dan ekstrimnya tekanan ekonomi dikisaran tahun 1990-an. Globalisasi pasar dan ekonomi kapitalisme akhirnya berimbas pada sektor sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Nasionalisme, “Negara-bangsa” akhirnya hanya menjadi simbol dan slogan elitis yang tanpa makna. Liberalisasi politik yang memunculkan gelombang kebebasan berdemokrasi, dan kebebasan media massa yang membuat berakhirnya pemerintahan rezim Orde Baru, yang dikenal dengan gerakan reformasi tahun 1998 (Suwarsono 2011, 113), menjadi fakta sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Kebebasan demokrasi atas tuntutan reformasi itulah yang menjadi embrio bagi Indonesia memasuki pasar global. Di tengah arus globalisasi, nasionalisme ekonomi dan budaya di Indonesia ketika itu tampak menemukan momentum baru. Modernisasi dan industrialisasi yang berkembang ketika itu telah membuka pasar global produk perdagangan barang dan jasa ekonomi *manufacturing*.

Meski waktu itu hampir semua produk nasional dan kebijakan ekonomi harus berhadapan dengan proteksionisme negara maju, seperti Amerika dan Eropa Barat (Giddens 1999, 129). Maka

hadirnya arus globalisasi dan teknologi tidak bisa terdihindarkan pengaruhnya terhadap proteksi nilai nasionalisme bidang ekonomi dan industri kita. Meski kita juga paham bahwa tidak semua sistem nilai dan budaya yang dibawa globalisasi berdampak negatif terhadap ketahanan nasionalisme

“Negara-bangsa” bidang ekonomi dan industri sebagai identitas bangsa. Ketika budaya teknologi bersama arus global itu dimanfaatkan untuk tujuan produktif di sektor ekonomi, perbankan dan industri, dampak yang muncul lebih bersifat positif. Tetapi sebaliknya, ketika budaya teknologi global itu digunakan untuk tujuan konsumtif, dampaknya cenderung bersifat kontra produktif. Permasalahannya seberapa besar kesenjangan budaya teknologi global itu itu berpengaruh terhadap nilai-nilai ekonomi sebagai benteng untuk mempertahankan identitas nasionalisme Negara-bangsa itu sendiri.

Nasionalisme dalam Perspektif Sosial & Politik

Diskursus nasionalisme negara-bangsa dalam konteks sosial dan politik global masih relevan untuk dibahas, khususnya kasus-kasus pelaksanaan UU No: 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia yang memiliki diversitas dan heterogenitas, sosial dan politik. Menurut penulis, globalisasi dan desentralisasi secara konseptual menjadi permasalahan serius bagi penguatan nasionalisme negara-bangsa. Pada satu pihak globalisasi berorientasi pasar bebas, dipihak lain, desentralisasi berorientasi pada penguatan komunitas. Artinya pada tataran praksis, peran negara dalam konteks ini tidak lagi dominan secara politik, dan sosial seperti abad 20-an. Kondisi ini terjadi karena pasar bebas dalam tataran global dan penguatan komunitas dalam tataran lokal secara teoritis mulai mampu menandingi kekuatan “nasionalisme” negara-bangsa. Bahkan alasan klasik adanya keresahan masyarakat berkaitan dengan isu nasionalisme karena selalu dikaitkan dengan negara-bangsa, yang didalamnya lebih didominasi peran negara ketimbang peran masyarakat sipil (*civil society*). Nasionalisme dalam paradigma ini tidak pernah dikaitkan dengan pasar, maupun komunitas, seperti konsep kebijakan otonomi daerah. Pada hal banyak para intelektual memprediksikan bahwa, semakin menguatnya tekanan pasar global dan komunitas secara politik, dan sosial dalam jangka pendek dapat melampaui kekuatan negara dan dianggap menjadi ancaman nasionalisme negara-bangsa itu sendiri (Fealy 2003, 139). Sebenarnya negara tidak menjadi lemah, yang terjadi adalah sebuah elaborasi negara-bangsa, pasar bebas dan penguatan komunitas.

Penandanya “pasar bebas ditengarai proses globalisasi, dan penguatan komunitas lokal yang bercirikan otonomi daerah, mulai mengimbangi potensi kekuatan Negara (pemerintah) yang dianggap mendominasi. Selama nasionalisme dikaitkan dengan negara-bangsa, maka perimbangan relasi antara (negara-bangsa, pasar global, dan penguatan komunitas lokal) dianggap sebagai ancaman isu nasionalisme. Dari perspektif tersebut yang terjadi sekarang adalah tarik-menarik antara pasar pada tataran global, dan penguatan komunitas pada tataran lokal tanpa melalui mediasi pada tataran ideologi nasionalisme negara-bangsa. Realitasnya isu nasionalisme, negara-bangsa seolah olah mengalami ancaman dari pasar global, dan komunitas lokal dari kebijakan otonomi daerah. Contohnya, masyarakat Gorontalo yang melakukan pemekaran dan membentuk Provinsi sendiri, bisa dilihat sebagai “*etno-nasionalisme*” bagi pemerintah pusat di Jakarta. Tetapi bagi masyarakat Gorontalo hal semacam itulah yang dianggap sebagai “nasionalisme” mereka, yakni nasionalisme di tingkat lokal, karena proses otonomi daerah. Hal ini menjadi penting karena dalam konteks inilah nasib mereka ditentukan. Jika dilihat dari teori *imagined communities* (Anderson 1991), maka para komunitas petani di Gorontalo itu sudah tidak lagi mengimajinasikan dirinya sebagai anggota negara-bangsa dalam konteks nasionalisme di Indonesia. Tetapi mereka sebagai anggota komunitas lokal Gorontalo, yang tengah memperjuangkan eksistensi penjualan produk pertaniannya di tengah gempuran proses globalisasi. Pada saat yang bersamaan misalnya, seorang pengusaha tenun tradisional (kain songket) di Flores Barat, ia tidak lagi mengimajinasikan dirinya sebagai anggota negara-bangsa yang memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Tetapi ia akan melihat peluang bagaimana dapat memasarkan kain tenun tradisional produksinya di pasar global sehingga orang lain di berbagai penjuru dunia dapat membelinya. Kedua komunitas yang saya contohkan tersebut berada di wilayah teritorial Negara Indonesia, tetapi ia mengimajinasikan diri mereka sebagai anggota komunitas lokal, di pasar global, bukan warga “negara-bangsa” Indonesia. Pertanyaannya, apa makna negara-bangsa dan nasionalisme bagi petani di Gorontalo, dan pengrajin kain tenun tradisional di Flores Barat?

Wajah realitas “negara-bangsa” yang terdekat pada tataran praksis dengan petani di Gorontalo, dan pengrajin tenun tradisional di Flores Barat adalah penyelenggara atau pemerintah di tingkat lokal.

Mereka menjalankan profesinya masing-masing di wilayah pemerintah daerah (lokal), dengan tetap memenuhi aturan social, politik dan ekonomi yang diberlakukan di komunitasnya. Dari kedua contoh kasus tersebut, terdapat jargon “berpikirlah secara global, tetapi bertindaklah secara lokal

(glokalisasi), jika ingin keluar dari keresahan. Selama nasionalisme hanya dikaitkan dengan “negara-bangsa” maka selama itu pula globalisasi dan otonomi daerah akan dirasakan sebagai ancaman. Maka makna “nasionalisme” dilihat dari perspektif politik seharusnya tidak ditafsirkan sebagai ancaman, tetapi menjadi tantangan generasi dimasa mendatang di Indonesia.

Nasionalisme, dalam Perspektif Budaya

Ketika “nasionalisme” dikaitkan dengan konteks budaya negara-bangsa, maka diperlukanlah ketahanan budaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran nasionalisme Indonesia. Sedangkan ketahanan budaya yang dimaksud adalah pelestarian budaya lokal masyarakat Indonesia. Artinya semua budaya itu yang ada keterkaitannya dengan masyarakat, bukan dengan negara-bangsa. Budaya lokal yang berkembang secara dinamis sering ditafsirkan mempunyai prospek yang cerah, bagi perubahan sosial di masyarakat. Tetapi permasalahannya apakah budaya lokal perlu dipertahankan, atau dilestarikan untuk menumbuhkan nasionalisme Negara bangsa. Tentunya hal itu tergantung pada pilihan masyarakat itu sendiri, baik secara individu maupun kolektifitas. Isu nasionalisme dapat menonjol, atau cenderung surut tergantung pada berbagai pendapat tentang elemen warga negara, etnis, budaya, dan ideologi masyarakat Indonesia.

Namun sebagian besar teori tentang “nasionalisme cenderung mencampur adukkan semua elemen tersebut dengan komponen lainnya. Menurut Kellas (1998, 4), isu nasionalisme merupakan bentuk ideologi yang membangun kesadaran rakyat suatu bangsa untuk memberi sikap dan tindakan. Perilaku seorang nasionalis itu didasarkan pada bagian dari suatu komunitas bangsa. Secara *historical*, nasionalisme di Indonesia muncul sebagai jawaban atas kolonialisme. Pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah ketika itu telah membangkitkan semangat solidaritas bagi suatu komunitas bangsa yang menginginkan adanya kemerdekaan. Semangat solidaritas itulah yang dinyalakan terus menerus oleh para pejuang hingga kini dan masa mendatang. Nasionalisme di masa kolonial dipahami sebagai dalang pergerakan pembebasan kemerdekaan. Secara filosofis hal itu merupakan kekuatan yang mengikat diri menjadi satu pandangan bahwa memperjuangkan negara-bangsa ketika itu merupakan entitas yang amat penting. Hal itu mendasarkan pada pemikiran kolektif, dimana kesetiaan dan tugas mereka adalah semata-mata hanya untuk negara-bangsa. Dari pandangan tersebut, nasionalisme dalam arti “sempit”, dimaknai sebagai suatu sikap yang lebih meninggikan bangsanya sendiri dari pada bangsa lain. Sedangkan dalam arti luas merupakan pandangan ideologi terhadap negara-bangsa. Pada saat ini, paradigma yang digunakan untuk memaknai nasionalisme berangkat dari pemikiran artikuaris. Makna nasionalisme dikaitkan dengan kejayaan masa lalu, tanpa melihat keterkaitan dengan masa kini, dan masa akan datang. Makna nasionalisme ketika itu dikonstruksi untuk memberikan semangat perjuangan para nasionalis untuk mencapai satu tujuan yakni kemerdekaan negara-bangsa. Semangat perjuangan berkobar dimana-mana karena dorongan kesadaran nasionalisme. Perjuangan politik dapat terfokus untuk kekuasaan kolektif atas kehendak rakyat dengan tujuan yang sama, yakni masyarakat adil dan makmur yang terbebas dari belenggu kolonialisme.

Dalam konteks tersebut, teori romantisme menyebutkan bahwa identitas budaya dan debat liberalisme menganggap kebenaran politik bersumber dari kehendak rakyat atau gabungan di antara keduanya (Barker 2006, 176). Teori ini lebih condong menganalogikan bahwa ikatan nasionalisme tumbuh ketika masyarakat pola pikirnya mulai merosot. Ketika itu naluri untuk mempertahankan diri berperan untuk mendorong mempertahankan negara-bangsa. Dari sanalah awal tumbuhnya ikatan nasionalisme. Pertanyaannya apakah nasionalisme masih dianggap relevan, ketika komodifikasi budaya berpihak pada konsep kapitalisme (Giddens, 1999, 173). Dimana budaya cenderung melepaskan dari keterkaitannya pada *nation state*. Maka, proses glokalisasi budaya komunitas masyarakat hendaknya tidak dilihat sebagai kontra produktif, tetapi justru menjadi penguatan nasionalisme negara-bangsa dalam konteks yang lebih luas.

Potret Nasionalisme di Indonesia

Ketika sebuah Negara yang bernama Indonesia akhirnya terwujud pada 17 Agustus 1945, dengan seluruh penghuninya yang disebut bangsa Indonesia, permasalahannya ternyata belum tuntas. Indonesia masih harus berjuang dalam perang kemerdekaan (1945-1949), ketika Belanda ingin menjajah kembali dengan membonceng tentara sekutu (Abdullah 2001, 2). Secara historis,

nasionalisme kita diuji di tengah gejolak politik adu domba (*divide et impera*). Bahkan setelah adanya pengakuan kedaulatan (1949) muncul gerakan separatis diberbagai wilayah. Akhirnya di masa demokrasi terpimpin nasionalisme di ambil alih negara. Pada akhirnya nasionalisme politik itu

bergeser ke arah (politik dan budaya) sampai tragedi nasional 30 September (peristiwa G, 30S) 1965, dan sesudahnya bergenti pemerintahan orde baru (Abdullah 2001, 6). Di masa pemerintahan rezim orde baru nasionalisme telah bergeser menjadi konsep modernisasi dan industrialisasi (pembangunan). Implikasinya nasionalisme ekonomi muncul ke permukaan. Pada saat yang sama, arus globalisasi mulai memudahkan batas-batas kebangsaan, kecuali tentang batas wilayah dan kedaulatan negara. Negara mengambil alih urusan nasionalisme atas nama kepentingan dan stabilitas nasional, sehingga terjadi apa yang disebut, ”*greedy state*” negara menguasai rakyat, hingga memori kolektif pun dicampuri negara. Inilah yang disebut nasionalisme negara (Abdullah 2001, 37). Di tahun 1998, reformasi telah memporak-porandakan stabilitas semu yang dibangun pemerintahan rezim orde baru, yang akhirnya menyebabkan krisis berkepanjangan di Indonesia. Sementara potret nasionalisme, terus semakin memudar. Banyak pihak menyatakan, nasionalisme sudah di titik nadir di tengah maraknya isu globalisasi, demokrasi, dan liberalisme. Meski kita sudah 68 tahun merdeka, solidaritas nasionalisme negara-bangsa masih belum terbangun dengan kokoh. Bahkan tantangan yang dihadapi sebagai sebuah negara-bangsa (*nation-state*) semakin kompleks (Abdullah 2001, 39). Pada saat ini, Indonesia telah menggunakan sistem demokrasi, dan di akui negara demokrasi di dunia. Tetapi sistem demokrasi tersebut tidak lantas dapat membebaskan Indonesia dari berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi yang berbasis informasi global (Abdullah 2001, 51). Misalnya permasalahan yang bertautan dengan kemiskinan, korupsi, ketahanan budaya, menurunnya nilai sosial, konflik antaretnik dan golongan, kekerasan/anarkisme, karut-marutnya pengelolaan wilayah perbatasan, penegakan hukum, serbuan budaya konsumerisme dan lainnya menjadi tantangan kesadaran nasionalisme negara-bangsa. Berbagai komponen tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang melemahkan kesadaran nasionalisme negara-bangsa.

Di era kebebasan demokrasi saat ini, kehidupan bangsa kita tampak tidak lebih baik daripada era sebelumnya yang justru mengekang kebebasan. Maka merupakan fenomena yang dianggap tidak asing, jika ada sekelompok masyarakat tertentu di (Aceh, Maluku, Papua), dan daerah lain berwacana untuk tidak bergabung dengan negara-bangsa Indonesia. Sebaliknya, tidak sedikit di antara masyarakat dan para pemimpin yang tetap mempertahankan Indonesia dalam wadah NKRI. Kelompok terakhir ini senantiasa memberikan statemen bahwa NKRI merupakan harga mati bagi negara kesatuan Indonesia. Pertanyaannya bagaimana kita memahami dan memaknai kedua fenomena yang kontroversial tersebut dalam konteks nasionalisme negara-bangsa. Apa yang salah dalam pengelolaan negeri yang kaya akan sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA) ini, mungkinkah ada faktor lain yang berpengaruh.

Sebenarnya makna nasionalisme negara-bangsa, tidak bisa terpisahkan dengan keragaman budaya. Artinya ikatan budaya yang bersifat multikultural telah menyatukan negara-bangsa Indonesia. Konsep nasionalisme bukan semata-mata konsep politik, tetapi juga sekaligus konsep budaya. Ketika nilai budaya mengalami pergeseran akibat interaksi budaya asing (global), maka terjadi pula penurunan semangat nasionalisme negara-bangsa. Modernisme juga memiliki pengaruh terhadap ketahanan budaya lokal. Modernisme syarat dengan liberalisasi yang lebih mendorong ke arah pasar bebas, dimana cenderung mengaburkan batas-batas otoritas sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya maupun nasionalisme negara-bangsa itu sendiri.

Pada dasarnya nasionalisme adalah suatu paham atau aliran yang diyakini oleh masing-masing individu warga bangsa, sehingga sampai kapanpun tidak akan bulat keseluruhan. Makna nasionalisme secara epistemologis dibatasi oleh ideologi dan konteks masing-masing. Bahkan pemahaman terhadap makna “nasionalisme” cenderung “salah kaprah”. Artinya sesuatu yang maknanya keliru dianggap biasa atau “lumrah” oleh masyarakat tertentu. Akibatnya, nasionalisme cenderung dimaknai beragam dan menjadi permasalahan diskursif di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, kita harus bisa memutuskan untuk membangkitkan rasa kebangsaan. Bukan nasionalisme untuk mengatasi berbagai perbedaan masa lampau karena kondisinya sudah berbeda. Nasionalisme yang perlu kita bangkitkan adalah yang berguna untuk mengatasi permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Misalnya bagaimana bersikap jujur, kerja keras, adil, disiplin, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, menghormati hak orang lain, dan lainnya. Membangun nasionalisme tidak sekedar berpaham dalam ideologi, tetapi juga membangun dalam arti membuat *action* yang bisa memberikan makna kongkrit

terhadap konsep nasionalisme itu sendiri baik secara individu maupun organisasi dan kelembagaan. Dengan demikian, memaknai nasionalisme negara-bangsa haruslah yang sudah berupa tindakan perwujudan kongkrit dalam konteksnya masing-masing. Inilah makna diskursif ketika kita memahami

nasionalisme negara-bangsa secara komprehensif, dalam berbangsa dan bernegara di bawah tekanan sosial, ekonomi, dan budaya teknologi global saat ini. Makna itu bukan saja terdapat pada dokumen Negara, tetapi banyak kita dapatkan dari teks pemberitaan media di era modern ini.

Nasionalisme dalam Teks Media

Pada dasarnya nasionalisme negara-bangsa yang dikonsepsikan dalam artikel ini hampir semuanya merujuk pada kekuatan media. Media mampu membingkai dan mengartikulasikan representasi dan konsep nasionalisme negara-bangsa, bukan saja dalam tataran kognitif, tetapi juga masuk pada ranah ideologis sebagai bangsa. Pada aras itulah, naluri kebangsaan dapat dibangkitkan meski hanya melalui konstruksi media. Ketika rasa “nasionalisme” terusik dan dipublikasikan melalui media sebagaimana telah dipaparkan di bagian pendahuluan artikel ini, komunitas masyarakat yang direpresentasikan sebagai bangsa Indonesia menjadi marah. Seluruh kejadian itu, kita ketahui dari pemberitaan media (media massa dan media baru). Reaksi masif yang berisi kecaman, kutukan, dan luapan rasa nasionalisme seketika itu mencuat dengan kencangnya.

Begitulah, teks media memang memiliki kekuatan efektif dalam membangkitkan nasionalisme, terlebih lagi jika martabat dan kedaulatan bangsa Indonesia ini sedang diserang oleh bangsa asing. Kita harus mengakui bahwa kelahiran media nasional memang tidak terlepas dari rasa kebangsaan itu sendiri. Misalnya, munculnya Pers Perjuangan 1945, dan kemunculan secara historis dan fenomenal media televisi kita (TVRI). Kelahiran televisi di Indonesia berkaitan erat dengan pemupukan ideologi nasionalisme kebangsaan. Pada tahun 1962, menjelang pelaksanaan ASEAN Games yang keempat, Presiden Soekarno waktu itu sangat yakin bahwa televisi diperlukan untuk membuktikan reputasi negara ini dalam konstelasi politik internasional. Krishna Sen & David T Hill (2001, 126) menyatakan bahwa Soekarno bertaruh untuk sebuah peran panggung di dunia. Ini berarti Indonesia harus ditelvisikan agar dunia dapat menyaksikan kegigihan perjuangan bangsa Indonesia dalam bidang olah raga menandingi olimpiade dunia yang telah eksis duluan di era itu. Namun, apakah pada momentum perpolitikan saat ini televisi dan media massa masih menjadi agen nasionalisme? Jika di-era Soekarno televisi sengaja diposisikan dalam konteks hubungan politik internasional, saat ini televisi publik itu lebih berperan memperkuat paham kebangsaan secara internal (dalam wilayah negara dan bangsa Indonesia sendiri). Fenomena ini dapat dilihat ketika Indonesia ditimpa isu separatisme. Contohnya, sorotan media terhadap kasus penyusupan para aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) yang menyamar sebagai para penari Cakalele yang berupaya membentangkan bendera “Benang Raja” ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara Hari Keluarga Nasional ke-14 di Ambon, 29 Juni 2007 [3]. Ketika itu hampir semua stasiun televisi dan media cetak di Indonesia cenderung menunjukkan kecaman bahkan kutukan terhadap perilaku tersebut. Demikian pula saat bendera Bintang Kejora ditampilkan dalam sebuah acara adat di Papua. Semua jenis media memberikan tanggapan yang kritis. Tidak terkecuali ketika terjadi penurunan dan pembakaran bendera Merah Putih di sejumlah wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh kelompok GAM [4]. Media massa kita memberitakan peristiwa itu dan lebih berpihak pada kepentingan nasionalisme. Berbagai pendapat yang tertulis dalam teks media menyatakan agar pelaku perusakan bendera kebangsaan itu ditindak tegas menjadi berita utama (*headline*).

Konsistensi Media

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian media massa kita masih konsisten dalam mengobarkan ideologi nasionalisme. Bahkan, lembaga media lebih berani dan sangat terbuka dalam memihak nasionalisme ketimbang pihak pemerintah atau rezim politik yang berkuasa. Hal ini merupakan kewajaran karena media massa mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan gagasan yang sedang menjadi opini publik. Pola-pola untuk menunjukkan nasionalisme masih dijalankan media ketika martabat bangsa Indonesia diserang oleh bangsa lain. Fenomena tersebut juga menegaskan bahwa media memiliki otonomi kebebasan untuk menunjukkan sikapnya. Gejala yang sama dapat kita lihat dalam kasus persengketaan Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia [5]. Ketika itu media menjadi perangkat yang sangat ekspresif dalam mengartikulasikan kegeraman masyarakat dan mengutuk Malaysia. Melalui pemberitaannya, media membingkai gagasannya untuk mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Idiom “NKRI sebagai harga mati”

atau “NKRI sudah final”, yang lazim dianut kalangan nasionalis ortodoks, dan mendapatkan dukungan pihak media ketika itu.

Imagined Community

Penggambaran peristiwa-peristiwa yang berisi serangan terhadap harga diri bangsa, pada mulanya tidak diketahui masyarakat. Ketika seluruh kejadian itu ditayangkan televisi dan dibahas secara mendalam oleh media maka lahirlah masyarakat yang dibayangkan atau *imagined community* (Anderson 1991, 43). Berita-berita yang disajikan media pun menjadi representasi dari aspirasi-aspirasi publik. Pada titik itulah nasionalisme negara-bangsa dapat terbentuk dengan mudah. Nasionalisme bukanlah ideologi yang muncul secara alamiah. Nasionalisme adalah produk atau ciptaan dari masyarakat yang anggota-anggotanya secara individual belum tentu pernah bertemu dan membuat kesepakatan, tapi merasakan emosi persaudaraan yang sederajat melalui pembacaannya di media. Selain itu, nasionalisme juga diperlihatkan media dengan menyoroti dan membela korban-korban yang berjatuh akibat kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Itulah nasionalisme media yang selalu bersifat kontekstual. Konstelasi pembacaan teks media tersebut menunjukkan adanya relasi yang amat kuat dengan apa yang kita fahami sebagai nasionalisme.

PENUTUP

Nasionalisme, negara-bangsa hingga saat ini masih menjadi persoalan diskursif dan dinamis dalam konteks ke-Indonesia-an di aras akademik dan kalangan intelektual. Meski demikian, nasionalisme negara-bangsa memiliki peran strategis untuk mempertahankan makna nasionalisme sebagai identitas bangsa, yakni tersimbolisasinya makna ke-Indonesia-an. Namun demikian, seiring dengan rentang waktu dan dinamika, dalam perjalanannya pemaknaan “Nasionalisme Negara-bangsa” sering mengalami pasang surut. Banyak hal yang menjadi petanda dinamika pasang surutnya pemaknaan nasionalisme negara-bangsa. Pada perspektif ekonomi dan industri, muncul diskursus bahwa kebutuhan pragmatis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dianggap dominan dikonotasikan menjadi pintu masuk untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada terciptanya stabilitas keamanan ekonomi, untuk mempertahankan nasionalisme, negara-bangsa. Sedangkan jika dilihat dari perspektif sosial politik, penandanya proses globalisasi dan penguatan komunitas lokal yang bercirikan otonomi daerah, mulai mengimbangi potensi kekuatan negara yang selama ini dianggap mendominasi.

Selama nasionalisme masih dikaitkan dengan negara-bangsa, perimbangan relasi antara negara-bangsa, pasar global, dan penguatan komunitas lokal dianggap sebagai ancaman isu nasionalisme. Dari perspektif tersebut, yang terjadi sekarang adalah tarik-menarik antara pasar pada tataran global dan penguatan komunitas pada tataran lokal tanpa melalui mediasi pada ideologi nasionalisme negara-bangsa. Isu nasionalisme, negara-bangsa seolah olah mengalami ancaman dari pasar global, dan komunitas lokal dari kebijakan otonomi daerah. Pada perspektif budaya, tampak bahwa kebudayaan cenderung melepaskan dari keterikatannya pada *nation state*. Maka, proses “glokalisasi” budaya di komunitas masyarakat lokal hendaknya tidak dilihat sebagai kontra “nasionalisme negara-bangsa”, tetapi justru menjadi penguatan nasionalisme, dalam kontek negara-bangsa.

Pada akhirnya dari perspektif media, ia mampu membingkai dan mengartikulasikan representasi dan konsep nasionalisme, negara-bangsa bukan sekedar dalam tataran kognitif, tetapi juga mampu mengartikulasikan ideologi nasionalisme, negara-bangsa. Pada titik itulah nilai nasionalisme kebangsaan dapat dibangkitkan walaupun hanya melalui konstruksi pemberitaan media. Ketika rasa nasionalisme bangsa terusik dan kemudian dipublikasikan melalui media, masyarakat yang direpresentasikan sebagai bangsa ”emosi dan marah”. Ini sebuah petanda bahwa teks media memiliki kekuatan yang efektif dalam membangkitkan semangat nasionalisme ketika martabat dan kedaulatan bangsa ini terganggu oleh pihak lain. Hal ini karena kehadiran media itu sendiri tidak bisa terlepas dari rasa kebangsaan. Bahkan sekarang ini media memiliki kekuasaan dan kebebasan yang melebihi negara, dan pola-pola untuk menunjukkan nasionalisme masih mereka jalankan secara konsisten ketika bangsa terusik kedaulatannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2001. *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press
Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of*

- Nationalism*. London: Verso
- Aspinall, Edward., Greg Fealy, eds. 2003. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*. Singapore: ISEAS.
- Barker, Chris. 2006. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: PT. Kreasi Wacana.
- Berrett, M. 1991. *The Politics of Truth: From Marx to Foucault*. Stanford CA: Stanford University Press
- Friedman, Thomas L. 1999. *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*. London: Harper Collin.
- Fukuyama, F. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: The Free Press.
- Giddens, A. 1999. *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London.
- Kellas, G. James. 1998. *The Realitas of Nationalism and Ethnicity, Second Edition*. McMillan: Palgrave.
- Nordholt, Henk Schulte. 2008. Identity Politics Citizenship and the Soft State in Indonesia : An Essay. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 hal. 37.
- Seda, Francisia. 2011. *Ikatan Budaya Nasionalisme Indonesia dan Ketahanan Budaya di Tengah Dinamika Globalisasi dengan Desentralisasi: Suatu Kajian Sosiologis*. Jakarta: PT. Obor.
- Sen, Krishna., David.T. Hill. 2001. *Televisi, Budaya dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Media Lintas Inti Nusantara.
- Smith, A.D. 1990. Towards a Global Culture, in *Global Culture*, ed. M. Featherstone. London and Newbury Park. CA: Sage.
- Suwarsono. 2011. Beberapa Acuan untuk Membaca Ikatan Budaya dan Nasionalisme Indonesia, Melalui Perspektif Regional atau Kedaerahan, dalam *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press & PT. Obor.